

JURNAL

Kajian Strategik dan Global

Transformasi Paradigmatik Ketahanan Nasional sebagai Kajian Strategik

Abdul Rivai Ras²

rivai_ras@yahoo.com

Abstract

This article tries to elaborate national security in terms of science and an overview of the historically paradigmatic transformation. The study of national resilience in Indonesia has developed dynamically as a response to the development of strategic environment. Various approaches ranging from interdisciplinary to transdisciplinary are described as part of discovering the scholarly format of this study. This study is in its development into a universal approach and refers to the sciences related to the good governance, assessment of national strength and national security leadership. Also the study of national resilience is able to predict the potential of a nation's fall-wake or the failure of state administration to realize security and development. And the consequences of this study requires an interdisciplinary approach even trans-disciplinary.

Keywords: strategic study; paradigmatic transformation; interdisciplinary-transdisciplinary; national interests

Copyright © 2018 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved

² Dosen Ketahanan Nasional, Kajian Strategik Ketahanan Nasional SKSG Universitas Indonesia

1. Kajian Interdisiplin Ketahanan Nasional

Tulisan ini merupakan pengembangan dari tulisan yang disampaikan pada Seminar dan Workshop Aktualisasi Kajian Multidisiplin dalam Pengembangan Program Kajian Ketahanan Nasional di Kampus Universitas Indonesia, di Depok 30 September 2015. Pembahasan diletakkan dalam perspektif menunjukkan konteks historisitas dalam pergulatan panjang menentukan format kajian dengan merujuk pada pendekatan dan paradigma dengan turunannya baik dari segi ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Konteks kesejarahan ini menjadi penting untuk menunjukkan proses transformasi secara paradigmatis yang dilewati dalam proses membangun ketahanan nasional sebagai sebuah kajian strategik.

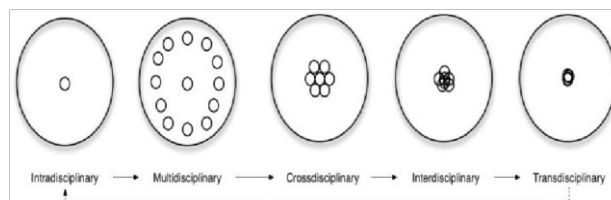
Kajian ketahanan nasional mengalami kemajuan pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*scientific knowledge*) dan peradaban dunia (*civilized world*). Meskipun kajian ini relatif baru dan berkembang di Indonesia, namun kajian ini sesungguhnya mempunyai kesetaraan dengan kajian-kajian yang dikembangkan oleh sejumlah negara di dunia berdasarkan pendekatan interdisiplin. Salah satu kajian yang mengemuka dan menyerupai kajian ketahanan nasional adalah kajian strategik (*strategic studies*) yang terpusat pada *peace and conflict studies*, *national security studies*, *leadership and governance*.

Kajian-kajian tersebut mempunyai keterhubungan dengan politik internasional, geostrategi, diplomasi, ekonomi dan kekuatan militer. Bahkan, ruang lingkup kajian ini juga mencakup kajian tentang peran intelijen, tata kelola pemerintahan dan kerjasama internasional dalam kerangka kepentingan keamanan dan ketahanan nasional. Terdapat beberapa kajian sejenis yang dikembangkan dan mempunyai keterkaitan kajian ketahanan nasional dengan disiplin ilmu lain, yakni kajian strategis yang pendekatan berpikirnya bersifat multidisiplin dan

crossdisiplin (lihat Gambar 1). Dalam perkembangannya karena kompleksitas fenomena kajian-kajian ini beririsan dengan kepentingan nasional dan internasional, dan membawa konsekuensi pada adanya kebutuhan interdisiplin dan bahkan transdisiplin. Salah satunya dapat dijelaskan dengan keberadaan program kajian keamanan nasional pada George Washington University di bawah *Elliott School of International Affairs* dan program kajian strategik pada Nanyang Technological University di bawah *S. Rajaratnam School of International Studies*, dimana pendekatan keilmuannya bersifat interdisiplin. Sedangkan kajian yang menggunakan nomenklatur kajian keamanan dan ketahanan hanya pada

Northeastern University di bawah *College of Social Sciences and Humanities*, yang pendekatan keilmuannya relatif lebih maju atau bersifat transdisiplin.

Gambar 1. Proses pengembangan ilmu dari berbagai disiplin



(Stember, M. 1991. "Advancing The Social Sciences Through The Interdisciplinary Enterprise", *The Social Science Journal*)

Berbeda halnya dengan program kajian ketahanan nasional di Universitas Indonesia yang berdiri sejak lebih dari tiga dekade yang lalu, masih dihadapkan pada tantangan akademik yang harus mampu merespon secara ilmiah terhadap fenomena yang ada dan mengundang berbagai debat terhadap paradigma tentang evolusi teori ketahanan nasional. Setidaknya terdapat empat tahapan evolusi dalam mengembangkan kajian ketahanan nasional. Pertama, adanya interpretasi intuitif (1962) yang oleh para

sejumlah pemikir Orde Lama dari komunitas militer lebih memikirkan persoalan kajian tentang 'kekuatan apa yang ada di dalam negara' agar suatu negara dapat bertahan. Kedua, semangat heuristik (1968) yang mengkaji tentang 'kekuatan apa yang seharusnya dikembangkan oleh negara' dalam mengelola stabilitas. Ketiga, berkembangnya pendekatan logika (1969) yang mengkaji tentang 'kekuatan dan daya tahan minimal yang harus dimiliki negara' dalam menghadapi ancaman intra dan antar-negara. Keempat, meluasnya konsep pendekatan analitis (1972) yang mengkaji tentang 'kondisi dinamis suatu negara' yang berisi keuletan dan ketangguhan sebagai modal dalam pengembangan kemampuan (*from ability to capability*).

Tulisan ini berupaya melakukan dua hal sekaligus, yaitu pertama melakukan elaborasi terkait dengan bidang keilmuan ketahanan nasional dan kedua, mengupas gambaran tentang transformasi paradigmatis kajian ketahanan nasional. Tulisan ini berhadapan dengan realitas adanya pendekatan paradigma realisme, rasionalistik dan revolusioner. Melalui dua langkah tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai 'kajian-kajian ketahanan nasional' sebagai suatu ilmu yang dapat dikembangkan dengan pendekatan interdisiplin hingga pendekatan transdisiplin yang setara dengan 'kajian-kajian strategik'.

2. Tinjauan Paradigmatik Ketahanan Nasional

Upaya pengembangan kajian ketahanan nasional tidak terlepas dari cara berpikir paradigmatis sebagai sebuah kerangka kerja intelektual (*intellectual framework*) yang menstrukturkan satu pemikiran tentang seperangkat fenomena. Konsekuensinya adalah ketahanan nasional harus diletakkan sebagai sebuah fenomena yang dapat dikaji secara ilmiah berdasarkan prioritas paradigma yang dianut oleh setiap individu, komunitas atau suatu negara-bangsa (Kuhn,

2012). Paradigma merupakan suatu *cognitive map* yang dapat membantu untuk memetakan realitas yang terjadi guna meyakinkan proses penalaran tentang peristiwa-peristiwa yang kompleks dan multidimensional.

Paradigma menawarkan model tertentu dalam melihat realitas atau bagaimana dunia memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empirik. Kajian ketahanan nasional dapat dipandang sebagai fenomena sosial dan politik dihubungkan dengan teori yang dikembangkan berdasarkan pengalaman empirik dan ditinjau dari teori-teori strategik serta ketahanan nasional (Subramanyam, 2003). Implikasinya adalah bahwa secara metodologis, pendekatan yang dikembangkan dalam berbagai dimensi yang kompleks dapat dilihat secara lebih sederhana berdasarkan model penalaran teori ketahanan nasional (*many to one*).

Perbedaan paradigma mempunyai pengaruh pada perbedaan pusat perhatian dalam melihat suatu masalah dan sekaligus memiliki kecenderungan bias dari apa yang seharusnya menjadi fokus dari kajian tersebut bilamana tidak mempunyai basis keilmuan yang tegas. Beberapa paradigma atau tradisi dalam kajian strategik sebagai landasan dalam melihat fenomena-fenomena ketahanan nasional adalah paradigma realistik, rasionalistik, dan revolusioner. Paradigma yang dianut sejumlah peneliti bidang kajian ketahanan nasional sejak Perang Dunia I dan II, pemikiran ketahanan yang berkembang banyak merujuk pemikiran tradisi realisme menurut Hobbes (2008) dan Machiavelli (2005). Teori-teori yang dibangun dalam periode tersebut yang berkaitan dengan teori ketahanan nasional mencakup teori *zero-sum-game* dalam hubungan antar-negara, teori politik kekuatan (*power politics*), dan teori tatakelola pemerintahan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam urusan ketahanan (*state-centric concept of security*). Hal ini berarti bahwa isu ketahanan nasional, termasuk keamanan di dalamnya, menjadi keniscayaan bagi setiap negara, karena

diasumsikan bahwa setiap negara mempunyai potensi ancaman dari negara lain (Morgenthau, 2005).

Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada 1945 hingga peristiwa 11 September 2001, paradigma realistik relatif masih berkembang dan mewarnai kajian-kajian strategik terkait ketahanan nasional. Dalam periode yang sama sejumlah negara memilih tradisi rasionalistik pemikiran Hugo Grotius sebagai pemikiran jalan tengah untuk menjawab tantangan kajian-kajian strategik yang kemudian mulai diterapkan dalam paradigma ketahanan nasional. Dari perspektif Grotius ketahanan nasional dipahami sebagai kajian internasional yang memikirkan tentang kondisi masing-masing kekuatan negara untuk tetap stabil, damai, dan bertahan dari segala ancaman yang tidak hanya mengandalkan aspek domestik tetapi juga aspek internasional. Karenanya Grotius memandang bahwa pengaruh politik negara secara internasional penting dalam mengatasi konflik dengan mempertimbangkan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian strategis (Jeffery, 2006). Tradisi ini juga disebut sebagai tradisi yang bersifat internasionalistik yang menekankan pentingnya dukungan komunitas internasional dalam membangun ketahanan suatu bangsa dan negara. Karena itu, kekuatan negara tidak terbatas hanya pada kekuatan militer, melainkan pada kebutuhan akan pentingnya lembaga-lembaga, norma-norma, aturan-aturan dan diplomasi yang dinilai lebih penting dalam mengembangkan kajian ketahanan nasional.

Berbeda dengan paradigma realistik dan rasionalistik, terdapat paradigma revolusioner yang berkembang pasca peristiwa 11 September 2001, yang saat ini banyak dirujuk oleh para ahli dan pengkajian strategis dalam mengembangkan teori-teori keamanan dan ketahanan. Paradigma ini juga disebut sebagai tradisi universalistik seperti pemikiran Kant yang mengedepankan masalah-masalah hubungan

sosial dan hubungan antar negara yang mengaitkan antara individu, warga sipil dan negara di dalam mendukung penguatan eksistensi negara (Kant, 2008). Di samping itu, paradigma revolusioner yang notabene bertumpu pada aktor utama individu, dimana isu moralitas (moral imperatives) menjadi keharusan di dalam menopang stabilitas dan kinerja demokrasi.

Tinjauan paradigmatis ketahanan nasional dalam tiga tradisi tersebut menjadi tantangan keilmuan dalam kajian-kajian strategik. Tantangan utama adalah bagaimana memahami banyaknya aliran pemikiran (*school of thought*) dalam memecahkan masalah di bidang kajian yang bersifat interdisiplin. Perbedaan paradigma yang digunakan oleh sejumlah negara di dunia dalam memandang fenomena ketahanan nasional, akan membedakan karakter kajian yang akan dikembangkan secara spesifik di masing-masing universitas.

Sebagai ilustrasi, kajian ketahanan nasional di negara-negara berkembang atau yang pemerintahannya masih otoriter, cara memandang tentang isu-isu ketahanan nasional berbeda dibandingkan dengan negara maju dan demokratis. Kondisi ini disebabkan oleh adanya orientasi pemikiran yang bersifat tradisional dan relatif tertutup, sehingga pengembangan kajian ketahanan nasional bersifat eksklusif dan dekat dengan paradigma realistik. Sedangkan secara ilmiah, kajian ketahanan nasional dihadapkan pada sejumlah disiplin ilmu yang telah menjadi basis pengembangannya saat ini lebih merujuk pada referensi kajian strategik. Fokus dari kajian strategik modern menjadi meluas hingga pada isu-isu demokrasi, keterbukaan, hubungan sosial, hubungan lintas budaya, perdamaian, hukum dan kemanusiaan yang mempunyai keterhubungan dengan kajian-kajian yang bersifat universal.

3. Esensi Keilmuan Ketahanan Nasional dalam Konteks Strategis

Pada negara-negara maju esensi keilmuan ketahanan nasional lebih banyak merujuk pada

paradigma yang dekat dengan tradisi revolusioner, sehingga, konsep kajian ketahanan mengintegrasikan kajian-kajian yang bersifat politis-strategis dengan kajian-kajian manajemen-kepemimpinan. Keterkaitan antara kedua kajian ini pada dasarnya menggabungkan sejumlah disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dalam tata kelola kehidupan nasional. Artinya, kajian ketahanan nasional sekaligus merupakan kajian kepemimpinan keamanan nasional yang mencakup kajian tentang manusia, ekonomi, pemerintahan, keamanan dan pembangunan yang mempunyai keterhubungan interdisipliner dari ilmu politik, ilmu hubungan internasional, kajian keamanan dan kajian strategis (Spear & William, 2012).

Bahkan secara khusus ketahanan nasional berhubungan dengan pengukuran kekuatan nasional untuk melihat semua elemen yang berkaitan dengan kapabilitas suatu negara (Tellis, 2001). Karena itu, muncul konsekuensi logis pada peserta didik dalam kajian tersebut untuk memahami keilmuan secara komprehensif, integral dan sistemik. Dalam diskusi tentang pemikiran Daoed Joesoef mengenai “Ide Tentang Multidisiplin” yang diselenggarakan CSIS di Jakarta pada 22 September 2015 dirumuskan bahwa tujuan kajian ini adalah menyiapkan diri untuk menjadi *a specialist in the construction of the whole*, suatu kualitas kajian multidisipliner atau interdisipliner yang diniscayakan bagi seorang pemimpin terutama di bidang ketatanegaraan dan politik.

Sebagai ilustrasi penerapan hal tersebut dapat dilihat dari isu kepemimpinan nasional yang menjadi bagian dari kajian strategis, dimana secara multidisiplin dan interdisiplin mempunyai hubungan dengan rumpun ilmu politik (perhatikan gambar berikut). Gambar 2. Hubungan kajian ketahanan nasional dan ilmu politik



(Sumber: Baylis, J., Wirtz, JJ dan Gray, CS. 2013. *Strategy in the Contemporary World*)

Kajian ketahanan nasional di beberapa negara mempunyai definisi yang berbeda-beda, namun secara esensial objek kajian ini menitikberatkan pada keilmuan yang berkaitan dengan tata kelola negara. Kajian ini berhadapan dengan isu-isu strategis dan sistem internasional yang memunculkan konsekuensi pada beberapa pengertian ketahanan dalam kajian strategis, diantaranya adalah:

- Ketahanan dipahami sebagai wujud dari kepentingan nasional untuk tetap mempertahankan kedaulatan, independensi politik, integritas wilayah dan identitas bangsa sesuai dengan kepentingan nilai-nilai utama (*core values*) yang dimiliki oleh masing-masing negara.
- Ketahanan sebagai perwujudan *self-help system*, dimana negara harus mempunyai daya tahan dan kemandirian dalam memberikan jaminan atas keberlangsungan bangsanya melalui upaya mempertahankan dan melindungi wilayah kedaulatan negara dan sumber-sumber daya nasional yang ada di dalamnya (Glaser, 2010).
- Ketahanan sebagai *endurance and sustainability of the people, nations and states*. Merujuk pada Judith Rodin (2014), ketahanan adalah sebuah konsep yang terkait dengan sejumlah disiplin ilmu yang ditransformasikan ke dalam dunia praktis dan

dunia nyata yang sifatnya *multifaceted* dan bersifat operasional. Misalnya, pembangunan ketahanan untuk menghadapi berbagai ancaman bencana baik karena alam maupun manusia. Untuk itu, menurut Rodin kerangka kerja ketahanan mencakup *readiness*, *responsiveness*, dan *revitalization*. Di samping itu, kajian ketahanan modern yang bersifat strategis maupun operasional harus didekati secara holistik, terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan (Rodin, 2014).

Sedangkan dalam perspektif Indonesia sejak kajian ketahanan nasional dikembangkan, ketahanan didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara (Sunardi, 2004).

Oleh karena itu, kajian ketahanan nasional secara ontologis merupakan kondisi dinamis suatu tata kelola pemerintahan negara yang dapat menentukan keberlangsungan pembangunan, mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan mencegah berbagai realitas ancaman melalui pemberdayaan kekuatan nasional. Secara epistemologis, ketahanan nasional merupakan ilmu pengetahuan yang dapat diilmiahkan dengan pendekatan ‘konsep politeknik’ dengan cara mengukur kemampuan elemen kekuatan nasional. Termasuk di dalamnya keuletan dan ketangguhan (yang dimaknai sebagai hasil dari pembangunan nasional), entitas masyarakat, struktur wilayah geografi (konsep ruang), aktor-aktor dan lembaga yang terkait pemerintahan nasional, serta mencakup sistem-sistem penangkalan.

Untuk itu, dalam melakukan kajian ketahanan nasional secara ilmiah dapat dilihat dalam berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang

sangat memengaruhi adalah melalui pendekatan filsafat keilmuan sosialpolitik. Sedangkan secara aksiologis, produk-produk ketahanan nasional dapat menjadi konsep *grand strategy* dalam rangka mengembangkan tata kelola negara, dalam dimensi keamanan dan pembangunan.

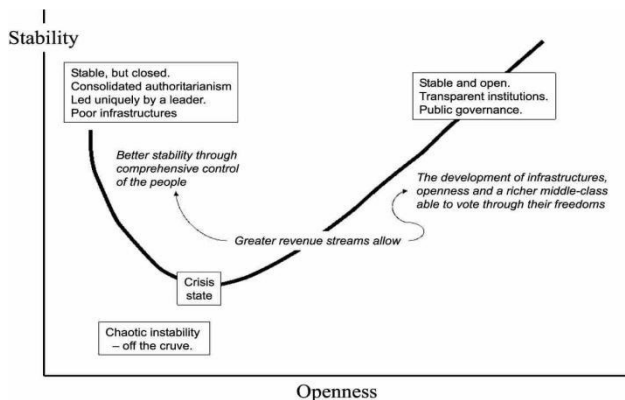
4. Ketahanan Nasional sebagai Kajian Strategik

Ketahanan Nasional merupakan kajian modern yang dikembangkan oleh para pemikir strategis pada 1960-an. Kajian ketahanan nasional pada awalnya hanya dikenal di Indonesia, dan mulai dipahami masyarakat internasional sebagai *applied science* baru yang mempunyai kesetaraan dengan kajian strategis berbasis akademis pada 1980-an. Kajian Bremmer (2008; lihat juga Acemoglu &

Robinson, 2012) bersifat interdisipliner yang memusatkan perhatian pada kombinasi kajian strategis dan manajemen.

Secara strategis, ketahanan nasional merupakan kajian tentang jatuh bangunnya suatu negara-bangsa melalui pendekatan teori-teori katastropik, teori kelembagaan dan J Curve terkait gagal dan suksesnya suatu pemerintahan (lihat Gambar 3). Kajian ini banyak menggunakan teori-teori kebijakan publik dan kekuatan nasional (*national power*) yang dimiliki oleh masing-masing negara melalui pendekatan teori-teori politik kekuatan dalam konteks hubungan antar negara. Bahkan dalam perkembangan mutakhir kajian ketahanan nasional mulai bergeser dan berkembang secara revolusioner menempatkan definisi ketahanan nasional sebagai wujud dari stabilitas dan kinerja negara (*state stability and performance*) dalam perspektif demokrasi (Lane & Ersson, 1994). Sedangkan terkait kajian manajemen, diarahkan pada kajian keamanan dan pembangunan serta pengelolaan berbagai sumberdaya yang berhubungan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Gambar 3. Kurva J



(Sumber: Bremmer, 2008)

Kecenderungan kajian ketahanan nasional tidak terlepas dari pemikiran konsep strategi masa lampau, yang terfokus pada kajian perang atau kajian pertahanan nasional. Namun seiring berkembangnya strategi modern, pemahaman konsep strategi semakin kompleks karena mencakup kajian kekuatan nasional secara menyeluruh, di samping kekuatan militer yang menjadi pilar utama dalam pencapaian kepentingan politik negara. Seperti dijelaskan Gray (1999) “... the use that is made of force and the threat of force the ends of policy”, dan hal ini sejalan dengan pemikiran Clausewitz yang mendefinisikan strategi sebagai bentuk engagements dari tujuan perang. Penjelasan ini menggambarkan adanya keterkaitan antara kekuatan militer dan tujuan politik, sehingga selalu digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan kebijakan politik dan pertahanan suatu negara.

Dalam mengelaborasi ketahanan nasional dalam konteks kajian strategis, erat kaitannya dengan pemikiran Gray dan Clausewitz, yang mengemukakan tujuh dimensi konsep strategi yang dipetakan ke dalam tiga kategori: yaitu pertama, dimensi strategi dalam kategori people and politics yang terdiri dari orang/individu, masyarakat, materi dan mentalitas, politik dan etika. Kedua, dimensi strategi dalam kategori

preparation for war yang meliputi ekonomi dan logistik, organisasi, administrasi militer, informasi dan inteligensi, doktrin dan teori strategi, dan teknologi. Ketiga, dimensi strategi dalam kategori *war proper* yang terdiri dari operasi militer, pimpinan (dalam politik dan militer), geografi, pergesekan dan lawan (Gray, 1999; Clausewitz, 2007). Dimensi-dimensi tersebut memiliki kontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan dari strategi besar (*grand strategy*) suatu negara yang kemudian dapat dikonversi ke dalam pengukuran indeks ketahanan nasional (Sunardi, 1998). Dimensi tersebut saling memengaruhi bahkan terdapat dimensi yang lebih fundamental dari dimensi lainnya. Namun, keberadaan dimensi ini hanya merupakan sebagian aspek yang tidak secara sepenuhnya berfungsi dalam menjelaskan teori umum dari strategi, khususnya dalam teori ketahanan nasional.

Dimensi-dimensi yang sudah dijelaskan ini dapat dilihat sebagai elemen-elemen penting dalam kajian strategis atau kajian pertahanan nasional, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian ketahanan nasional. Gambaran ini terlihat dari semua dimensi tersebut dari setiap kategori terdapat satu dimensi yang paling kuat, yaitu politik, individu, dan waktu, yang merefleksikan suatu kondisi dinamis dari suatu ketahanan negara.

Pada satu dekade terakhir, banyak negara mengembangkan konsep-konsep strategis yang berhubungan dengan kemampuan negara untuk mempunyai daya tahan dan daya tangkal dalam mengantisipasi munculnya berbagai ancaman-ancaman kontemporer yang bersifat asimetris, penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Beberapa peristiwa sejarah besar dunia yang terjadi beberapa tahun terakhir, diantaranya adalah peristiwa serangan teroris yang menimpa Amerika Serikat, *Arab Spring* di Timur Tengah, krisis ekonomi di Eropa dan sejumlah peristiwa lainnya yang berdampak pada pengembangan kajian-kajian strategis ketahanan di sejumlah negara di kawasan.

Sejumlah peristiwa ini merupakan fenomena menarik yang patut dicermati dan dikaji dihadapkan pada konsep ketahanan nasional suatu negara. Pada banyak negara, kajian ketahanan nasional dikembangkan sejalan dengan kajian keamanan nasional yang berhubungan dengan grand strategy suatu negara. Kajian ini menggambarkan “bagaimana memahami karakter-karakter strategis yang bersifat konstan dan normatif (*strategic constants and norms*), melingkupi kajian lingkungan fisik negara, karakter nasional, hubungan antara perang dan negara serta mekanisme keseimbangan kekuatan negara”.

5. Transformasi-Paradigmatik dalam Pengembangan Kajian Strategik

Transformasi-paradigmatik kajian ketahanan nasional mengalami pergeseran makna strategis pasca Reformasi 1998. Ketahanan nasional yang secara definitif menggambarkan kondisi dinamis suatu bangsa dapat dipandang sebagai output performance dari suatu kebijakan negara yang dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa. Ketahanan nasional bukan berarti hanya meninjau kondisi fenomena nasional yang terjadi secara internal atau *inward looking*, tetapi juga dapat bersifat eksternal atau *outward looking*. Pengaruh internasional merupakan salah satu faktor yang dapat menguatkan atau melemahkan ketahanan suatu negara, sehingga pengelolaan lingkungan strategis negara dapat dikembangkan sampai pada pembentukan yang lebih luas yakni ‘ketahanan regional’.

Transformasi secara paradigmatik ketahanan nasional pada dasarnya disebabkan oleh adanya fakta empirik, bahwa model ketahanan nasional yang dikembangkan pada masa pemerintahan otoriter (Orde Baru) dinilai gagal karena tidak mampu mendukung keberlangsungan model pemerintahan tersebut. Karenanya, paradigma ketahanan nasional yang berlaku dalam masa itu dinilai belum *in-line* dengan substansi demokrasi, sehingga makna ketahanan nasional secara ilmiah

dapat dipandang sebagai cerminan kajian politik yang berhubungan dengan stabilitas dan kinerja negara (*state stability and state performance*).

Kajian strategis ketahanan nasional yang berkembang pada abad 21, dikategorikan sebagai kajian tentang konsep dasar bagi strategi besar negara yang mampu merespon stabilitas keamanan, perdamaian dan demokrasi agar negara tetap eksis dan berkelanjutan. Suatu negara dapat dikatakan ‘berketahanan’ apabila mempunyai kekuatan cukup untuk dapat mengendalikan stabilitas dan perdamaian negatif. Dalam teori konflik sosial ditekankan bahwa pendekatan stabilitas adalah bentuk deeskalasi yang efektif. Sedangkan untuk menggandakan ‘ketahanan’ harus membangun kinerja ‘demokrasi’ yang substansial dan dapat menjamin perdamaian. Salah satu kinerja yang dimaksud adalah aspek kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mewujudkan tata kehidupan dan cita-cita nasional yakni, stabil, teratur, aman, sejahtera dan demokratis.

6. Simpulan

Secara ilmiah dalam memahami kajian ketahanan nasional harus berbasis pada suatu kajian yang bersifat interdisiplin dengan suatu paradigma yang mampu merespon perkembangan lingkungan strategis. Paradigma ketahanan nasional bukan berarti berlaku domestik dan eksklusif, tetapi ketahanan nasional dapat dilihat sebagai kajian yang berlaku secara universal dan dapat diterapkan di semua negara di dunia. Karena itu transformasi paradigmatik menjadi penting karena menjadi suatu keniscayaan untuk tumbuh dan berkembangnya kajian ketahanan nasional sebagai kajian strategik dan merujuk pada ilmu-ilmu yang berkorelasi dengan urusan tata kelola pemerintahan yang baik, penilaian kekuatan nasional dan kepemimpinan keamanan nasional. Selain itu, kajian ketahanan nasional mampu memprediksi potensi jatuhnya suatu bangsa ataupun gagalberhasilnya pemerintahan negara dalam

mewujudkan keamanan dan pembangunan. Dari sejumlah cakupan fokus kajian tersebut, secara metodologis mempunyai kesamaan dengan kajian-kajian internasional dalam pengembangannya. Untuk itu, generalisasi penalaran keilmuan dapat bersifat konvergen sehingga diperlukan pendekatan interdisiplin bahkan trans-disiplin.

Pada hakikatnya, kajian ketahanan nasional berkaitan dengan isu stabilitas negara dan kinerja demokrasi yang dianutnya. Oleh karena itu, kajian ini sesungguhnya terletak pada kemampuan negara untuk dapat menstabilisasi kondisi nasionalnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek keterbukaan sebagai wujud kinerja negara yang baik dalam interaksi internasional. Ketahanan nasional saat ini tidak lagi bisa berdiri sendiri tanpa didukung oleh ketahanan regional maupun global, artinya dimensi kajian ketahanan nasional meluas menjadi kajian strategis dalam pengertian kajian yang bersifat universal.

Referensi:

- Acemoglu, D dan James Robinson, 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Publishing Group
- Baylis, J, Wirtz, JJ, dan Gray, CS. 2013. *Strategy in the Contemporary World*. OUP Oxford
- Bremmer, I. 2008. *The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall*. Simon and Schuster
- Clausewitz, Cv. 2007. *On War*. Oxford University Press
- Glaser, CL. 2010. *Rational Theory of International Politics: The Logic of Competition and Cooperation*. Princeton University Press
- Gray, CS. 1999. *Modern Strategy*. Oxford University Press
- Hobbes, T. 2008. *Leviathan*. Simon and Schuster.
- Jeffery, R. 2006. *Hugo Grotius in International Thought*. The Palgrave Macmillan
- Kant, I. 2008. *On the Metaphysics of Morals and Ethics*. A & D Publishing
- Kuhn, TS. 2012. *The Structure of Scientific Revolutions: 50th Anniversary Edition*. University of Chicago Press
- Lane, JE & Ersson, S. 1994. *Comparative Politics: An Introduction and New Approach*. Wiley.
- Machiavelli, N. 2005. *The Prince*. Oxford University Press
- Morgenthau, H. 2005. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. McGraw-Hill Education
- Rodin, J. 2014. *The Resilience Dividend: Managing Disruption, Avoiding Disaster, and Growing Stronger in an Unpredictable World*. Profile Book
- Spear, J dan Williams, PD. 2012 *Security and Development in Global Politics: A Critical Comparison*. Georgetown University Press
- Stember, M. 1991. "Advancing The Social Sciences Through The Interdisciplinary Enterprise", *The Social Science Journal*, Volume 28, Issue 1, 1991
- Subramanyam, K. 2003. *Self Reliance and National Resilience*. Abhinav Publications
- Sunardi, RM. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Teori Ketahanan Nasional, Geostrategi Indonesia, dan Ketahanan Regional*. Kuaternita Adidarma
- Tellis, AJ. 2001. *Measuring National Power in the Postindustrial Age*. Rand Corporation
- Hasil diskusi tentang pemikiran Daoed Joesoef (Mantan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Indonesia dari 1978 sampai 1983), Ide Tentang Multidisiplin, pada Selasa, 22 September 2015 di CSIS, Jakarta.